

**REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
(Studi Pada Pemerintah Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**IKA PUSPITA JAYANTI
NIM. 0910310234**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

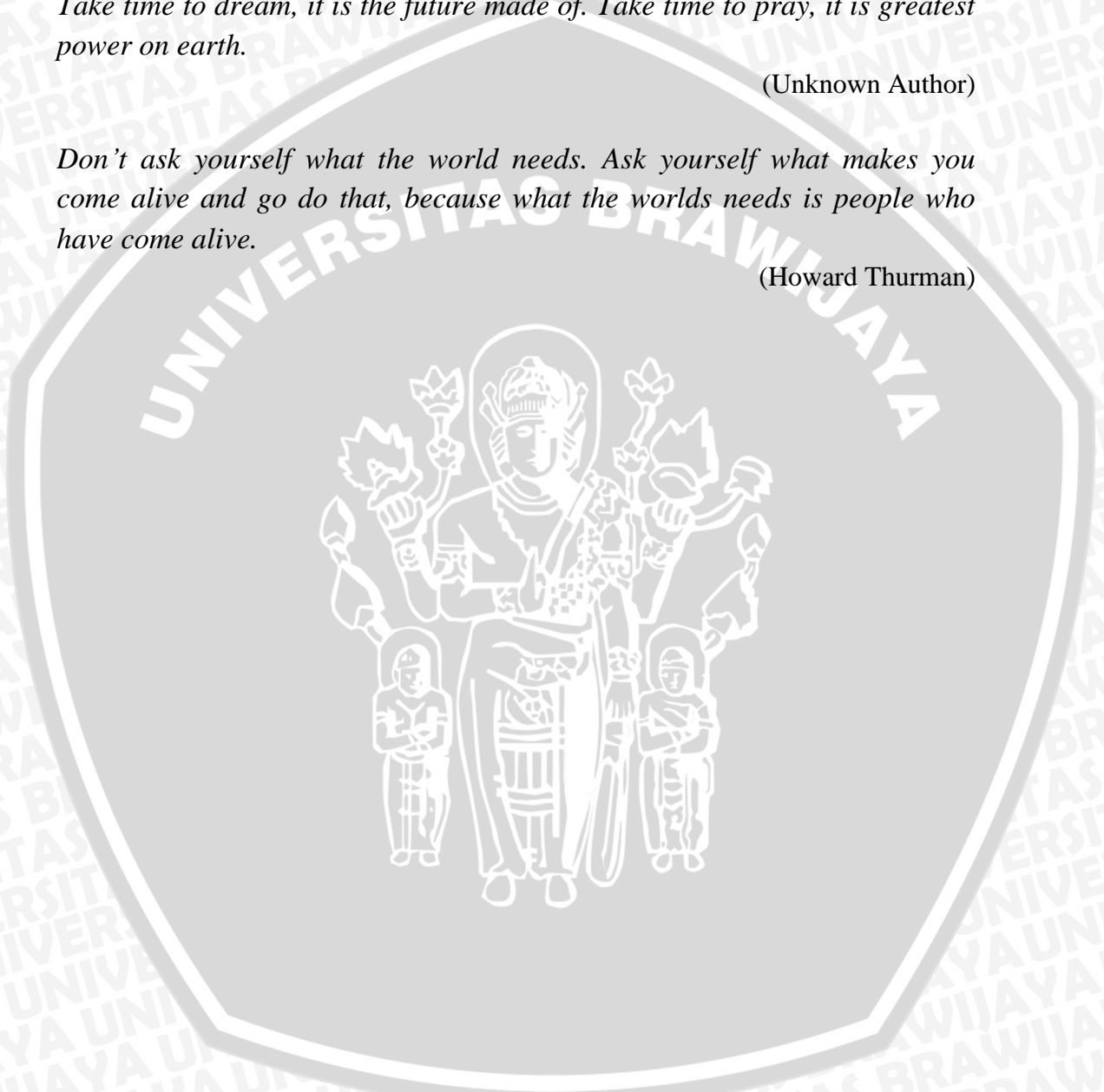
MOTTO

Take time to think, it is the source of power. Take time to read, it is the foundation of wisdom. Take time to quiet, it is the opportunity to seek God. Take time to dream, it is the future made of. Take time to pray, it is greatest power on earth.

(Unknown Author)

Don't ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive and go do that, because what the worlds needs is people who have come alive.

(Howard Thurman)



Thanks to:

*I dedicated my thesis to:
My beloved Dad and Mom,*

My lil brother,

And my best fellas,

*(F. Satyaningtyas M., Gabriella Ayu F., Aprianiannisa S.,
Debby Harley Ch., and Sella Anjartika).*

Big thank you all and I love you more.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka
Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Disusun oleh : Ika Puspita Jayanti

NIM : 0910310234

Fakultas : Ilmu Administrasi

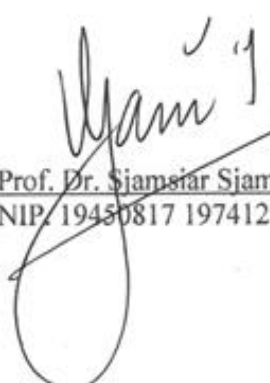
Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -


Malang, 17 Februari 2014

Komisi Pembimbing

Ketua


Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota


Drs. Abdul Wachid, MAP
NIP. 19561209 198703 1 008

TANDA PENGESAHAN

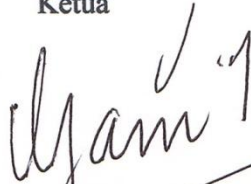
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Maret 2014
Jam : 11.00 – 12.00
Skripsi atas nama : Ika Puspita Jayanti
Judul : Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)

dan dinyatakan lulus.

MAJELIS PENGUJI

Ketua



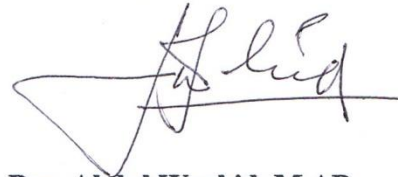
Prof. Dr. Siamsiar Samsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Ketua



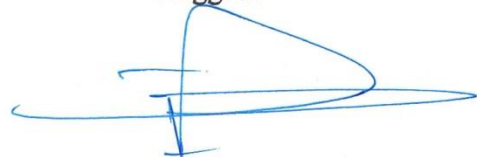
Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota



Ainul Havat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

SUMMARY

Ika Puspita Jayanti, 2014, **Reform of Local Financial Management in order to Create Transparency and Accountability** (Study at Government of Malang City), Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Drs. Abdul Wachid, M.AP, 148 page + xii

Local financial management reform needs support system that is more responsive budgeting can facilitate effort to meet increasing performance demands in order to create transparency and accountability. The research has some objectives, they are to find put, describe, and analyze reform of local financial management in order to create transparency and accountability and to find put, describe, and analyze affecting factors reform of local financial management at Government of Malang City.

The researcher employed descriptive research with qualitative approach. Analyze data within the research is collect, reduction, present, and draw conclusion from any data gained it terms of research objectives.

Based on finding of the research, it is found that (1) local financial management in budgeting reform at Government of Malang City emphasized to arrange performance budget set out in Local Regulation of Malang City No. 3 of 2004 about Local Financial Management. (2) In accounting reform, Government of Malang City determined the Standard of Government Accounting (SAP) as a guide the financial report arrangement. (3) Whereas in auditing reform, determined Standard Operating Procedure (SOP) and standard public service. (4) There are several supporting factors of reform of local financial management at Government of Malang City, among there are distinct regulation about local financial management, established new institution who organizing about local financial as BPKAD of Malang City, there are Standard Operating Procedure (SOP), and there are public involvement on development planning. (5) Based on finding of the research, it also found that some inhibiting factors that is the lack of human resources quality and supporting equipment. Therefore, Government of Malang City must work up human resources quality and fulfilling the lack of supporting equipment so improve that the performance of employees and finally in order to create transparency and accountability.

Keywords: reform, local financial management, transparency, accountability

RINGKASAN

Ika Puspita Jayanti, 2014, **Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas** (Studi Pada Pemerintahan Kota Malang), Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Drs. Abdul Wachid, M.AP, 148 Hal + xii

Reformasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif yang dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja sehingga dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) dalam reformasi penganggaran pada Pemerintah Kota Malang menekankan pada penyusunan anggaran berbasis kinerja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Dalam reformasi akuntansi, Pemerintah Kota Malang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. (3) Dalam reformasi pemeriksaan, menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan standar pelayanan publik. (4) Terdapat beberapa faktor yang mendukung reformasi pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adanya peraturan perundangan yang jelas tentang pengelolaan keuangan daerah, dibentuknya lembaga baru yang mengatur tentang keuangan daerah yakni BPKAD Kota Malang, terdapat *Standard Operating Procedure*, dan adanya keterlibatan masyarakat ikut dalam perencanaan pembangunan. (5) Dari hasil penelitian juga ditemukan beberapa faktor penghambat diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kota Malang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan memenuhi kurangnya sarana pendukung agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dan pada akhirnya akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: reformasi, pengelolaan keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Malang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku Ketua Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku Anggota Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi.
6. Bapak/Ibu karyawan Fakultas Ilmu Administrasi.
7. Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Malang.
8. Ibu Dra. Sutiarsi, M.Si selaku Inspektur Inspektorat Kota Malang.
9. Seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Malang.
10. Seluruh pegawai Inspektorat Kota Malang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi semua pihak.

Malang, 17 Februari 2014

Penulis

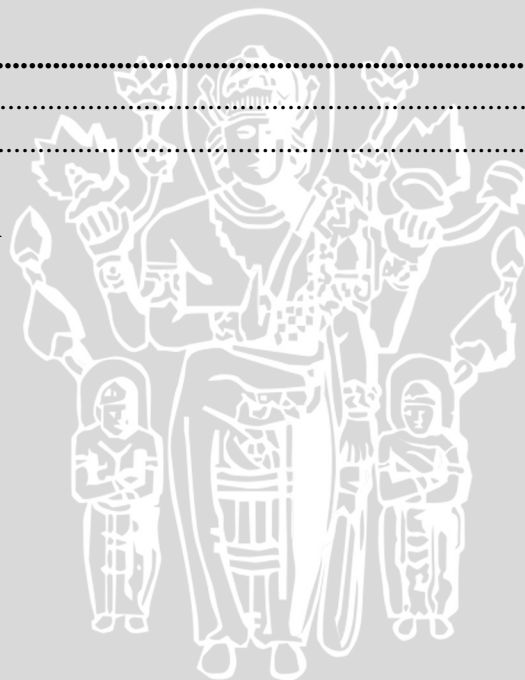
DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SUMMARY	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Administrasi Publik	11
B. Reformasi Administrasi	16
1. Pengertian Reformasi administrasi	16
2. Tujuan Reformasi Administrasi	18
3. Indikator Keberhasilan dalam Reformasi Administrasi	20
4. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah	22
a. Reformasi pembiayaan (<i>Financing Reform</i>)	22
b. Reformasi Penganggaran (<i>Budgeting Reform</i>)	23
c. Reformasi Akuntansi (<i>Accounting Reform</i>)	24
d. Reformasi Manajemen Keuangan Daerah (<i>Finance Management Reform</i>)	27
e. Reformasi Pemeriksaan (<i>Auditing Reform</i>)	28
C. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	31
1. Desentralisasi	31
2. Otonomi Daerah	33
D. Keuangan Daerah	35

1. Pengertian Keuangan Daerah	35
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	36
a. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	38
b. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah	40
c. Unsur Utama Pengelolaan Keuangan Daerah	42
3. Transparansi dan Akuntabilitas	43
a. Transparansi	43
b. Akuntabilitas	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Sumber dan Jenis Data Penelitian	56
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrumen Penelitian	59
G. Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Gambaran Umum Kota Malang	62
a. Sejarah Berdirinya Kota Malang	62
b. Keadaan Geografis Kota Malang	66
c. Demografi Kota Malang	69
d. Visi dan Misi Kota Malang	69
e. Program Pembangunan Kota Malang	72
2. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Asset (BPKAD) Kota Malang	75
3. Gambaran Umum Inspektorat Kota Malang	81
B. Penyajian Data Penelitian	86
1. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang	86
a. Reformasi Penganggaran	86
b. Reformasi Akuntansi	91
c. Reformasi Pemeriksaan	100
2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang	121
a. Faktor Pendukung	121

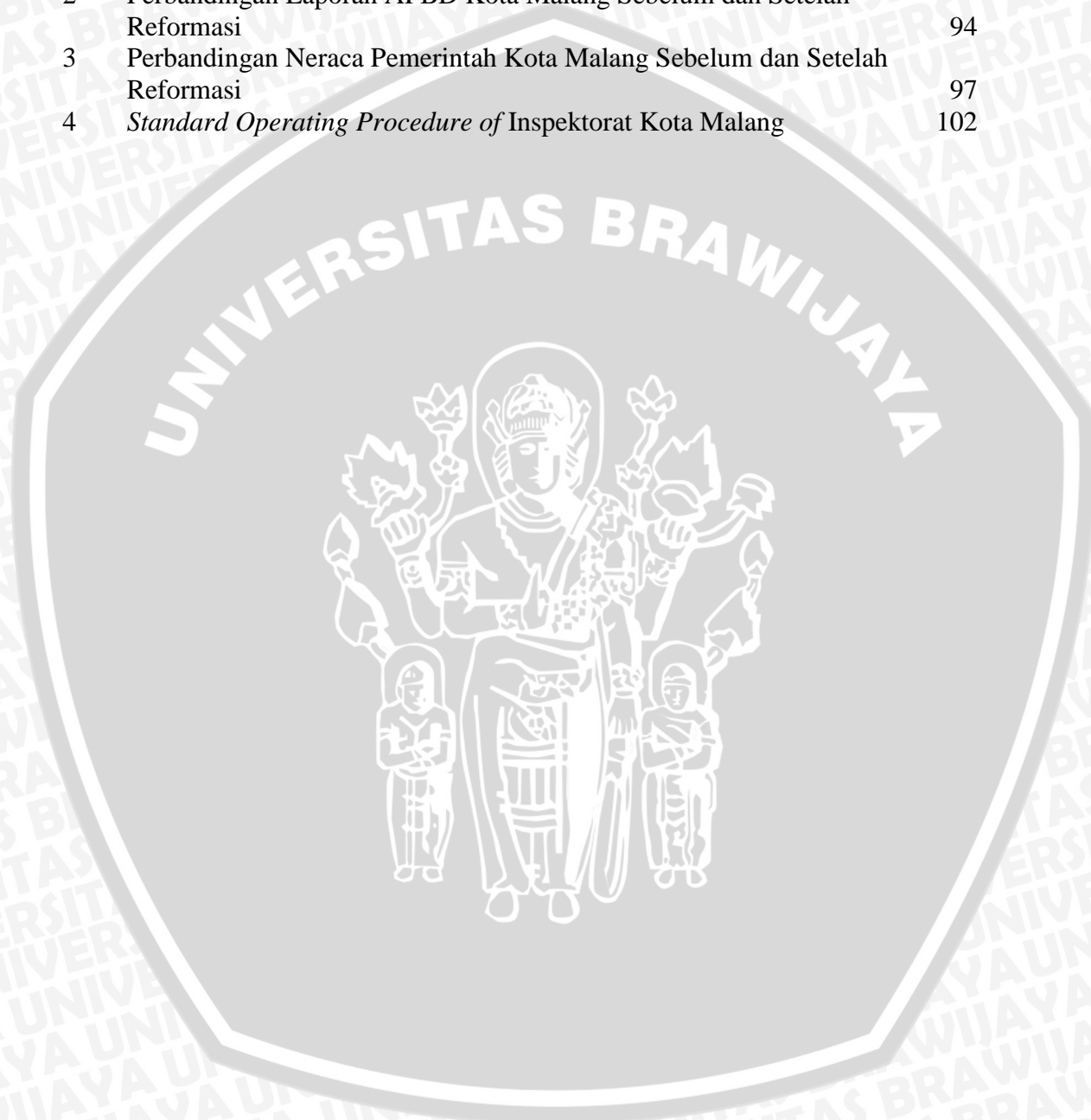
b. Faktor Penghambat	125
C. Analisis Data Penelitian	127
1. Pelaksanaan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang	127
a. Reformasi Penganggaran	127
b. Reformasi Akuntansi	132
c. Reformasi Pemeriksaan	136
2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah KotaMalang	140
a. Faktor Pendukung	140
b. Faktor Penghambat	145
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Sejarah Jabatan Pejabat Walikota Malang	65
2	Perbandingan Laporan APBD Kota Malang Sebelum dan Setelah Reformasi	94
3	Perbandingan Neraca Pemerintah Kota Malang Sebelum dan Setelah Reformasi	97
4	<i>Standard Operating Procedure of</i> Inspektorat Kota Malang	102



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	39
2	Bagan Unsur-unsur Utama Sistem Pengelolaan Keuangan dan Organisasi Pemerintah Daerah	44
3	Analisis Data	62
4	Peta Wilayah Kota Malang	67
5	Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Malang	80
6	Bagan Srtuktur Organisasi Inspektorat Kota Malang	85
7	Peraturan Walikota Malang No. 29 Tahun 2008 tentang Mekanisme	
8	Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Malang	89
9	Mekanisme Pelaksanaan PKPT	111
10	Prosedur Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kota Malang	119
11	Prosedure Pelayanan Publik pada Inspektorat Kota Malang	120



DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul |
|----|---|
| 1 | Surat Rekomendasi Penelitian |
| 2 | Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah |
| 3 | Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat |
| 4 | Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang |
| 6 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
| 7 | Keputusan Inspektur Kota Malang Nomor: 188/10/35.73.401/2012 Tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Inspektorat Kota Malang |
| 8 | Keputusan Inspektur Kota Malang Nomor: 188.4 /10/35.73.401/2011 Tentang Standar Pelayanan Publik Inspektorat Kota Malang |

